

TAJUK RENCANA

Tegas Memutus Matarantai Covid-19

HARI pertama PPKM Darurat, Sabtu (3/7) jalan utama di Kota Yogya masih seperti biasa, seperti Sabtu biasa ketika tidak ada PPKM Darurat. Meski Malioboro sedikit lebih sepi dan beberapa toko tampak tutup. Menurut Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, masih banyak ditemukan pelanggaran. (KR, 4/7).

Presiden memilih opsi PPKM Darurat dengan aturan yang lebih ketat, daripada *lockdown* atau karantina wilayah yang disuarakan sejumlah kalangan. Dan lewat Instruksi Gubernur No 17/INSTR/2021 sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri, DIY siap melaksanakan PPKM Darurat, yang telah diketok Presiden Jokowi Kamis (1/7) untuk Jawa dan Bali. PPKM Darurat diharapkan dapat lebih mengatensi mobilitas masyarakat. "Supaya PPKM Darurat bisa dilaksanakan dengan baik, saya berharap bagaimana masyarakat lebih punya kesadaran dan kemauan untuk tidak egois. Bisa menahan diri, kalau tidak perlu, tidak usah meninggalkan rumah. Sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemda DIY akan membatasi aktivitas di ruang publik secara ketat," kata Gubernur DIY, HB X usai rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota se-DIY. (KR, 3/7).

Tepat apa yang dikatakan Sri Sultan bahwa kita semua harus bisa menahan diri dan jangan egois. Memutus matarantai Covid bukan tugas Satgas Covid-19 semata. Tidak ada kata tidak, kita semua memiliki kewajiban mengawal tegaknya Ingub tersebut bisa dilaksanakan tanpa diskriminasi. Mengingat tiap hari terjadi pecah rekor kasus baru di DIY. Jumat (2/7) kasus baru Covid-19 mencapai 922 dan pasien meninggal 24 orang. Sabtu (3/7) kasus baru di angka 1.358 dan pasien meninggal 36 orang.

PPKM Darurat, bukan upaya pertama. Pelbagai strategi pernah dilakukan dalam upaya memutus matarantai

Covid-19. Awalnya, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 7 April 2020. Kemudian diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali dan 'dijalankan' PPKM Mikro sejak Februari 2021. Beberapa kali diperpanjang namun Covid-19 tidak kunjung surut. Kini Presiden Jokowi memutuskan PPKM Darurat sebagai strategi memutus matarantai pandemi covid. Situasi sekarang ini disebut Jokowi dalam konferensi pers Kamis lalu yang mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar sama-sama bisa membendung Covid-19.

Ketegasan aturan tanpa diskriminasi perlu dilaksanakan. Koordinasi hingga tingkat RT/RW menjadi kunci. Jika benar-benar dilaksanakan ketat, menurut Menko Luhut M Pandjaitan, 10-12 hari ke depan kasus Covid-19 akan menurun. (KR, 4/7). Karenanya, perlu upaya-upaya terobosan *extra-ordinary* di daerah. Dan DIY perlu memiliki keuletasan untuk menjalankan terobosannya, sesuai kearifan lokalnya. Dengan keistimewaan DIY, bisa memanfaatkan budaya *gotongroyong*, *gugur gunung* untuk *saiyeg saeka praja* melawan covid.

Artinya, memaknai budaya dengan lebih luas dan tidak sekadar sebagai *performance* semata. Instruksi 5M apalagi 3M tidak lagi cukup. Yang diperlukan kini adalah 6M : *mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama*. Ini harus menjadi budaya. Sementara menghadirkan *shelter* sehat - 'rumah sehat' untuk warga yang memiliki keluarga terpapar dan isoman di rumah - di tingkat RW, meningkatkan 3T (*testing, tracing, treatment*, pengetahuan di pintu masuk harus menjadi terobosan *extra ordinary*. Bila serius ingin memutus matarantai covid. □

Redesain Sanksi PPKM

Richo Andi Wibowo

saran yang pasti, yakni Rp 100.000. Sedangkan ada daerah yang menetapkan besaran tersebut sebagai besaran maksimal. Artinya, bisa saja pelanggaran mendapatkan denda yang lebih rendah dari Rp 100.000. Namun, ada pula daerah yang belum mendaftarkan sanksi denda ini di regulasi daerahnya.

Aneka perbedaan substansi regulasi ini berpeluang untuk menimbulkan ke-

keluhan pelayanan publik seperti indikasi pungli atau gratifikasi.

Memohon Bantuan

Terpantau pula terdapat website pemerintah daerah yang menyediakan *hot-line* corona. Namun tampaknya itu lebih didesain untuk memohon bantuan atau informasi atas situasi darurat penanganan penyakit. Sehingga bukan untuk sistem laporan yang berujung penindakan.

Selain itu, sebagian mekanisme pelaporan masih memerlukan metode komunikasi langsung - via telepon, atau akti-vasi akun berbasis email dan/atau whatsapp. Padahal boleh jadi masyarakat enggan melakukan ini. Diyakini mereka lebih nyaman untuk dapat melaporkan dengan tidak menun-jukan identitas atau anonim.

Boleh jadi masyarakat khawatir jika data mereka sebagai pelapor bisa bocor. Apalagi jika pihak yang dilaporkan dianggap sebagai orang kuat atau memiliki jaringan di pemerintahan. Mungkin pula masyarakat tidak nyaman jika yang ingin mereka laporkan adalah tetangga mereka, misalnya. Ini bisa dimaklumi karena pengaruh budaya *ewuh pekuwuh*.

Maka, dipandang relevan agar pihak terkait mempertimbangkan keempat isu di atas. Diharapkan ini akan dapat memudahkan dan mengefektifkan kerja Satpol PP atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk penegakan prokes. Sehingga, internalisasi disiplin masyarakat DIY dapat meningkat dan dapat segera bangkit di sektor ekonomi. □

*) *Dr Richo Andi Wibowo, Dosen FH UGM*



KR-INDO SANTOSO

bingungan di level implementasi. Bahkan dapat memancing masyarakat untuk menolak penerapan sanksi yang lebih berat di wilayahnya karena membandingkan regulasi daerah tetangga. Upaya pembedaan bandingan ini amat mungkin terjadi, karena penduduk DIY lazim beraktivitas dan mobilisasi lintaswilayah.

Keempat, perlunya mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar untuk melaporkan pelanggaran protokol kesehatan yang mereka ketahui kepada *task force* penegak disiplin prokes. Dari pantauan penulis, sebagian website pemda telah menjelaskan mekanisme untuk laporan atau pengaduan. Tampaknya sistem laporan atau aduan itu lebih ditujukan untuk menyampaikan

Denda Administrasi

Pertama, perlu dipertimbangkan untuk memprioritaskan denda administrasi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Denda administrasi diyakini akan lebih menghasilkan efek jera jika dibandingkan aneka jenis sanksi administrasi yang lain yang telah dibadankan di aneka regulasi daerah. Seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau kerja sosial.

Agaknya perlu dipertimbangkan untuk mulai mengesampingkan sanksi teguran. Pandemi sudah berjalan satu setengah tahun. Maka, sudah sepatutnya seluruh pihak tahu urgensi mengindahkan protokol kesehatan. Adapun untuk sanksi berupa kerja sosial masih dapat menjadi opsi.

Kedua, sanksi berupa denda administrasi perlu dibuat proporsional. Besaran denda dapat semakin meningkat berdasarkan parameter kemampuan ekonomi pelanggar dan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, perlunya keselarasan dalam pengaturan denda administrasi pada regulasi di aneka lingkup wilayah provinsi Yogyakarta.

Berdasarkan pantauan penulis ada wilayah yang telah mendaftarkan denda administrasi. Sebagian daerah ada yang menetapkan sanksi dengan be-

Etika Sosial Terbaru

Purwadmadi

mengelola ketahanan daya hidup berbasis kewargaan.

Etika Terbaru

Mobilitas, migrasi, kerumunan, dan perjumpaan antarwarga atau kebiasaan komunal, yang semula dirasakan sebagai sarana ekspresi pemenuhan etika sosial pergaulan hidup, perlu ditinjau ulang dan didesain kembali. Kerumunan dan intensitas perjumpaan (kontak erat) menjadi media tular yang dominan ketika terdapat ketidakjelasan keterpaparan pada tiap personal. Termasuk, kerumunan tak sengaja dan kontak incidental. Sedangkan kerumunan sengaja dan direncanakan, kontak erat rutin berulang karena kegiatan harian, juga tidak kalah dominan sebagai juru sebab ketertularan.

Etika sosial yang selama ini terekspresikan melalui perjumpaan (kontak erat) dan kerumunan (*guyup rukun*) patut diolah ulang. Berbagai macam kegiatan adat dalam masyarakat seperti arak-arakan, kenduri, *kondangan*, *jagong-nyumbang*, perhelatan, pesta makan, *tuguran*, pelayatan, *tilik-endhang*, bertamu *tilik sanja reriuangan*, *wedangan-obrolan*, dan sebagainya perlu memperoleh pendekatan baru dengan etika baru. Bentuk-bentuk ekspresi sebagai ukuran etik perlu dilakukan perubahan mengikuti tuntutan kebutuhan selaras dengan kesehatan. Ukuran beretika perlu mengalami mutasi budaya,

sehingga berubah dari ukuran etika sebelumnya. Jika terdapat kesepakatan sosial perlunya etika terbaru, maka masyarakat bisa masuk ke dalam suasana kelegaan karena terlepas dari beban melanggar etika budaya.

Pengakuan bersama atas etika terbaru akan mendorong segera perubahan ukuran perilaku etik yang menyesuaikan. Sehingga warga akan menemukan formula baru dalam adaptasi menuju kebiasaan baru. Semua akan menjadi maklum, jika ada peristiwa pernikahan tanpa perhelatan, ada peristiwa pekabaran tanpa perjumpaan, ada perembungan tidak dalam satu ruang, ada kasih sayang tanpa rangkulan dan jabat tangan. Etika terbaru akan melahirkan simbol ekspresi kepuasan baru sebagai pemenuhan etika sosial kekinian. □

*) *Purwadmad, pemerhati dan penulis seni-budaya.*

Pojok KR

Masyarakat belum paham, Pemda DIY minta bantuan TNI/Polri -- Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sosialisasi ***

Pandemi memaksa UMKM transformasi ke 'go-digital' -- Penting literasi digital ke UMKM ***

Penumpang KA jarak jauh wajib ter-vaksin -- Tetap perlu test dan taat prokes

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mengatasi Boring Belajar Daring

TERHITUNG sejak Maret 2020 hingga sekarang, Indonesia sudah melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dalam jaringan (online) karena adanya pandemi Covid-19. Tak bisa dipungkiri, platform Zoom, Google Meet, Google Classroom dan platform online lainnya terkesan membosankan bagi pelajar.

Merasa bosan itu adalah hal yang sangat wajar. Apalagi saat harus memahami pelajaran dengan menatap layar handphone dan laptop terus menerus. Hal tersebut juga membuat kepala rasanya pusing dan badan lelah dua kali lipat daripada saat pembelajaran tatap muka. Belum lagi saat jaringan tidak stabil, cukup menghambat proses belajar daring.

Maka dari itu, saya akan membagikan beberapa hal yang saya lakukan apabila belajar daring mulai membosankan. Pertama, tentukan waktu yang tepat dan nyaman untuk belajar. Misalnya, waktu ternyaman ketika tengah malam misalnya pukul 02.00 atau 03.00. Jadi apabila ada mata pelajaran yang ingin dipahami lebih dalam atau ketika mendapatkan PR, maka tidur lebih cepat dan memasang alarm pada jam tertentu. Cara seperti ini sangat efektif. Mulai sekarang cobalah untuk mencari waktu ternyaman.

Kedua, coba cari hal apa yang bisa menjadi pembangkit semangat (*mood booster*) untuk menemani waktu belajar di rumah. Misalnya musik. Cobalah

dengarkan musik kesukaan yang bisa membuat pikiran rileks. Dengarkan lagu yang liriknya bisa memotivasi.

Ketiga, coba cari teman belajar yang satu frekuensi atau memiliki pemikiran yang sama, nyaman dan nyambung saat berkomunikasi. Jadi meskipun belajar dan berkomunikasi daring tidak akan terasa membosankan.

Keempat, coba tulis kata-kata yang bisa memotivasi di catatan tempel (*sticky note*) dan tempelkan di tempat-tempat yang biasa dilihat di kamar. Bisa juga berbicara pada diri sendiri seperti, "Ayo, kamu bisa, semangat!" Kalau perlu sebut nama idola agar tambah semangat.

Kelima, apabila daring terasa boring, boleh mengambil jeda untuk beristirahat dan coba temukan cara tersendiri untuk menghilangkan stres. Sebagai manusia, ada waktu di mana kita merasa stres dengan apa yang dikerjakan secara terus menerus. Maka dari itu, kita perlu *break* atau istirahat.

Kita juga perlu yang namanya penghilang stres, misalnya keluar rumah sendirian sekadar untuk melihat sekitar rumah. Terkesan sederhana, namun menyenangkan. Tapi ingat, jangan terlalu lama beristirahat hingga menyebabkan hal-hal lainnya yang harus dikerjakan jadi terbengkalai. Kalian bisa Silakan mencoba di rumah atau temukan cara ternyaman. □

*) *Saniatul Annikmah Asmuni, Mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris, UAD.*

PERILAKU naluriah, *anut grubuyuk, grudak gruduk, runtung runtung*, tiga penanda penting tradisi naluri yang sering terpadukan dengan pemaknaan etika sosial *sapa aruh* dan *tilik mara sanja* dalam praktik hidup sehari-hari masyarakat. Bahkan, kumpul dan kerumun menjadi kebiasaan yang telah dianggap menjadi penanda ekspresi *guyup rukun*. Bentuk fisik penerapan etika sosial ini cengkah (berlawanan) dengan prinsip tuntutan kebutuhan masa pandemi virus, melalui penerapan protokol kesehatan. Kerumun dihindarkan, jaga jarak keharusan, cuci tangan dikerapkan, dan wajah bermasker syarat wajib dalam menata pergaulan harian.

Ekspresi modal budaya, seperti *kumpul-kumpul sapa aruh*, menjadi kurang produktif, bahkan cenderung destruktif, untuk kebutuhan perlambatan daya tular virus. Untuk itu, diperlukan suatu etika sosial terbaru (?) yang laras dengan kebutuhan ketahanan daya hidup masyarakat di masa pandemi.

Selain perlu transformasi modal-modal budaya, pada masa ini, diperlukan pula penataan ulang pemanfaatan modal sosial *guyup rukun* dan *gotong royong* sehingga produktif dan konstruktif, efektif dan efisien, dalam upaya memperkuat ketahanan daya hidup masyarakat. Modal sosial didesain menjadi lebih terstruktur, terukur, dan sistemik agar tidak terserak, tersebar, dan tercerai berai tanpa simpul koordinasi yang memadai. Modal budaya dan modal sosial adalah sumber kekuatan spiritual masyarakat. Sehingga bisa menjadi benteng kokoh, perisai penting, energi bergizi, dan peluru balas atas serangan pandemi. Modal sosial, kunci keswadayaan dan kemandirian dalam

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurinya Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang :** Jalan Lampasari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%